

FISCAL STRESS: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur

*Mesri Welhelmina N. Manafe*¹

*Zet Ena*²

*Salmun Saul Adu*³

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang^{1,2,3}

mesrimanafe@gmail.com¹

enazet21@gmail.com²

salmon_adu@yahoo.com³

ABSTRACT

Local governments play a significant role in the life of the community and the national economy which can be achieved in fiscal health conditions reflected in the low disparity in income structure towards regional expenditure. The inability of regions to escape fiscal dependence is due to the low income, especially from Pendapatan Asli Daerah, which causes fiscal stress which then impacts on policies and implementation of regional spending through spending on programs and activities. This study will examine the relationship between Fiscal Stress and Pendapatan Asli Daerah and expenditure of East Nusa Tenggara Province through simple linear regression testing using secondary data Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah and Belanja Langsung using a sample of six (6) districts / cities in 2014-2016. The results of the study show that the fiscal stress variable does not affect the income structure through Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah and Belanja Langsung at a significance level of <0.05. The results of this study contribute to local budget policies and theoretically to the use of direct expenditure variables that are different from previous studies.

Key Words: *Fiscal Health, Fiscal Stress, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Langsung*

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap kondisi fiskal dan *fiscal stress* pemerintah daerah sudah menjadi perhatian sejak diberlakukannya otonomi daerah. Setelah memasuki dua dekada, diharapkan kondisi *fiscal health* sudah dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah karena dapat menunjukkan tingkat kemandirian daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan di daerah. Dalam pelaksanaannya *fiscal health* masih menjadi wacana karena tingkat ketergantungan rata-rata pemerintah daerah yang tinggi mencapai 70% terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya transfer kesejahteraan kepada masyarakat yang tercermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nanga (2005) menyatakan bahwa dalam memasuki otonomi daerah, pemerintah masing-masing daerah memiliki disparitas fiskal yang sangat tinggi, hal ini disebabkan perbedaan dalam hal sumber-sumber penerimaan potensial dan sumber daya alam yang cukup lebih siap dalam menghadapi tuntutan kemandirian. Menurut Shamsud dan Akoto (2004) dan Setyawan dan Adi (2008) daerah dengan potensi pendapatan rendah akan menggali potensi penerimaan dari sektor pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya (Bahl, 1984; McKee dan Skidmore, 1993; Shamsud dan Akoto, 2004) yang menyimpulkan bahwa tidak ada ukuran pasti terhadap *fiscal stress*, namun merupakan proksi untuk *fiscal health* suatu daerah (Gorina dan Maher, 2016) yang dapat diukur melalui rasio finansial, perubahan presentase individu, pajak daerah dan *tax effort*. Nolenberger, Grover, dan Valente (2003), Henadle, Costa dan Angels (2004), Hendrick (2011), Jacob dan Hendrick

(2013), menekankan pada kondisi fiskal ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu keputusan internal dan lingkungan eksternal melalui beberapa variabel, seperti struktur fiskal, keseimbangan antara struktur fiskal dan lingkungan, budaya politik dan sumber-sumber ekonomi.

Fiscal health atau kondisi terpenuhinya transfer kesejahteraan kepada masyarakat karena pemerintah daerah mampu untuk memaksimalkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi disparitas fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai kondisi tersebut menyebabkan *fiscal stress*, yaitu kondisi pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan belanjanya untuk menyediakan pelayanan publik tersebut (Gorina dan Maher, 2016, Hendrick, 2011; Wolohojian, 1981). Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya faktor keuangan pemerintah daerah mendapat porsi terbesar sebagai penentu *fiscal stress* yang kemudian ditempatkan sebagai konsekuensi dan anteseden. Seperti dalam penelitian Bahl, 1984; McKee dan Skidmore, 1993; dan Shamsud dan Akoto, 2004; Setyawan dan Adi, 2008. Sobel dan Holcombe dalam Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya defisit keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak berhasil memaksimalkan potensi pendapatan dan melakukan efisiensi pengeluaran mendapatkan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada.

Pendapatan dan belanja daerah menunjukkan kondisi riil pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah berada pada kondisi tingkat ketergantungan yang rendah kepada pemerintah pusat karena kemandirian daerah yang tinggi bersumber dari pajak, retribusi daerah, dan ketersediaan sumber daya alam, maka fleksibilitas arah pembangunan dan kebijakan dapat tercapai. Arah pembangunan dan kebijakan tercermin dalam struktur belanja secara khusus belanja langsung (belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) yang mencerminkan kebijakan pemerintah dalam hal pencapaian target pelayanan publik. Setiap daerah mempunyai struktur pendapatan dan belanja masing-masing. Ada pemerintah daerah yang cenderung pada "*consumption-based taxes*" dan yang lain berada pada kondisi "*income-based taxes*" setiap kondisi berpengaruh dan dipengaruhi oleh *fiscal stress* secara berbeda (Shamsud dan Akoto, 2004). Walaupun ada perbedaan, tetapi untuk konteks Indonesia dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap struktur APBD pemerintah daerah (Setyawan dan Adi, 2005).

Fiscal stress pada penelitian-penelitian sebelumnya ditempatkan sebagai anteseden dan konsekuensi karena secara empiris dan teoretis terbentuk dari disparitas dan pola pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah terutama melalui pajak sebagai komponen terbesar yang menyumbang pendapatan berfluktuasi dan searah tekanan *fiscal stress*. Pemerintah daerah dengan tekanan ketergantungan yang besar terhadap dana transfer pusat akan berusaha menggali potensi PAD terutama pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mencapai kondisi *fiscal health*. Di sisi lain kondisi ini menunjukkan adanya tekanan fiskal yang tinggi. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Haryadi dan Bambang, 2002; Nanga, 2005; Setyawan dan Adi, 2005; 2006) dapat diuji hubungan antara *fiscal stress* dan pendapatan asli daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya.

Secara teoretis selain berdampak terhadap pendapatan daerah, *fiscal stress* menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan belanja daerah terutama belanja langsung yang bersinggungan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat melalui belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai langsung. Beberapa penelitian sebelumnya menempatkan belanja modal sebagai variabel yang dipengaruhi oleh *fiscal stress* (Haryadi dan Bambang, 2002; Nanga, 2005; Setyawan dan Adi, 2005; 2006). Penelitian ini akan menggunakan total belanja langsung, karena secara empiris dalam pelaksanaan belanja langsung lebih mencerminkan belanja untuk mencapai tujuan transfer kesejahteraan, karena total belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di level daerah (Fanggidae dan Manafe, 2019).

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Fiscal stress

Fiscal stress terjadi ketika pendapatan pemerintah daerah mengalami penurunan tanpa penurunan kompensasi dalam permintaan jasa pemerintahan daerah, ketika warga meningkatkan permintaan pelayanan pemerintah dan pendapatan daerah tidak dapat meningkat, atau ketika pemerintah yang lebih tinggi melanggar kewenangan pemerintah daerah dan kekuatan pemerintah dibawahnya tidak bisa menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan tanggung jawab pelayanan. Indeks upaya pajak dapat menunjukkan adanya *fiscal stress* di suatu daerah. Hal ini disebabkan karena pada saat *fiscal stress*, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub & Akoto, 2004).

Shamsub & Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya *fiscal stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *fiscal stress*. Penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi. 2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *fiscal stress*. 3. Menerangkan *fiscal stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol. Shamsub & Akoto, (2004) menemukan bahwa kemunduran industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini dapat menyebabkan *fiscal stress* sebagian dari peran ketidak efisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan.

Kebijakan otonomi daerah dan dikeluarkannya undang-undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah (Budi dan Priyo, 2002). Tuntutan otonomi daerah di mana daerah harus lebih mandiri dalam mengurus keuangannya, dan pembatasan pungutan pajak daerah memberikan tekanan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah tidak merata disetiap daerah. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya *fiscal stress* yang cukup tinggi di berbagai daerah Indonesia. Upaya pajak (*Tax effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber Pendapatan asli Daerah Budi dan Priyo (2008:3). Upaya Pajak adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan potensi sumber-sumber PAD. *Tax effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode tahun bersangkutan. Sementara definisi pendapatan asli daerah menurut ketentuan Undang-undang tersebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut unsur-unsur dalam pengertian Pendapatan Asli Daerah, antara lain : 1. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri. 2. Dipungut berdasarkan peraturan daerah. 3. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002:132) mengenai Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerahnya masing-

masing guna meningkatkan pendapatannya. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Belanja Langsung

Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Menurut fungsi pemerintahan, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan belanja untuk fungsi perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis kegiatan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabelitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Fiscal stress, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Langsung

Kebijakan desentralisasi dilakukan Pemerintah pusat dengan memberi wewenang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola kapasitas fiskalnya, sekaligus juga menanggung beban-beban yang selama ini menjadi tanggung jawab pusat. Hal ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada peningkatan pendapatan yang dikelola Pemda seiring dengan pelimpahan wewenang yang membutuhkan dana-dana Pemda. Kondisi seperti ini akan menimbulkan *fiscal stress* yang tinggi bagi pemerintah daerah di Indonesia paska otonomi (Vidi Priyantomo, 2007).

Analisis terhadap kondisi fiskal suatu pemerintah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kondisi fiskal adalah keadaan finansial *wellness* yang dimiliki oleh suatu pemerintah karena seimbangnyanya penerimaan dan belanja dalam struktur APBD-nya, sedangkan *fiscal stress* adalah kondisi pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan belanjanya untuk menyediakan pelayanan publik tersebut (Hendrick, 2011; Wolohojian, 1981)

Pengukuran terhadap desentralisasi fiskal menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai presentase dari total pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah (Holcombe dan Sobel, 1997). Presentase yang tinggi pengeluaran pemerintah menunjukkan pemerintah daerah memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi, Karena pengeluarannya bersumber dari pendapatan daerah (Oates, 1992). Selanjutnya Bahl, 1984; Holcombe dan Sobel, 1997, McKee dan Skidmore, 1993; Shamsud dan Akoto, 2004 menyatakan bahwa tren sentralisasi yang menjadi penyebab *fiscal stress*.

Permasalahan tingkat kemandirian yang belum dapat dicapai beberapa pemerintah daerah, diantaranya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebabkan karena rendahnya tingkat

penerimaan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban pelayanan masyarakat melalui belanja daerah. Sedangkan potensi pendapatan daerah yang paling signifikan adalah pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sehingga dapat menambah PAD terhalang dengan pemberlakuan UU no. 34 tahun 2000 (Setyawan dan Adi, 2008). NTT yang sudah mengalami tekanan fiskal sejak awal otonomi daerah dapat berdampak terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsud dan Akoto, 2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Hal ini sesuai dengan penelitian Saonard (2012) dan Setyawan dan Adi (2008) menunjukkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan PAD karena secara riil dapat menunjukkan tren perubahan PAD pada setiap periode.

Belanja daerah adalah operasionalisasi dari kebijakan daerah dalam hal pemenuhan pelayanan publik. Struktur belanja daerah lebih disebabkan tujuan pencapaian rencana strategis pemerintah dan faktor eksternal politik. Keluasan dalam pencapaian tujuan yang tinggi tercermin dalam struktur belanja daerah menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah. Belanja daerah sebagai komponen pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembanguna tercermin dalam dokumen-dokumen kebijakan daerah, seperti RPJP, RPJMD, KUA dan PPAS, RKPD, dan APBD. Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan tingkat sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan belanja pemerintah (Fanggidae dan Manafe, 2019).

Alokasi belanja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik diharapkan memberikan timbalbalik berupa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lain. Penelitian Haryadi (2002) menunjukan *Fiscal stress* secara positif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah krisis. Penelitian Andayani (2004) yang menguji *fiscal stress* pada saat krisis ekonomi dan sebelum krisis ekonomi menunjukan bahwa disaat daerah mengalami *fiscal stress* yang tinggi (yaitu pada saat krisis ekonomi) maka terdapat kecenderungan peningkatan belanja daerah. Dongori (2006) dan Purnaninthesa (2006) menunjukan fakta empiris yang hampir sama bahwa, *fiscal stress* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan daerah. Secara komperhensif, Dongori (2006) memberikan gambaran empirik bahwa dibandingkan dengan era sebelum otonomi daerah, pengaruh *fiscal stress* terhadap tingkat pembiayaan ini lebih banyak disebabkan adanya tuntutan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk petentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam hal ini belanja pembangunan.

Hasil-hasil penelitian di atas cenderung menempatkan variabel belanja modal terhadap *fiscal stress* dengan argumen bahwa belanja modal adalah bentuk investasi daerah yang mempunyai benefit dan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saonard (2012) dan Setyawan dan Adi (2008) menunjukkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan belanja daerah melalui belanja modal, tetapi perlu menjadi pertimbangan bahwa selain belanja modal terdapat belanja barang dan jasa dan belanja pegawai langsung yang secara bersama-sama digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan variabel *fiscal stress* dan belanja langsung. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Fiscal stress berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

H2: Fiscal stress berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Belanja Langsung.

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dari 6 (enam) Kabupaten/kota di Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Ngada, Kota

Kupang, Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014-2018 yang akan dianalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana untuk masing-masing variable terikat:

$$Y_1 = a + \beta X + e$$

$$Y_2 = a + \beta X + e$$

Keterangan:

X = *Fiscal stress*

Y₁ = Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Y₂ = Pertumbuhan Belanja Langsung

a = Konstantan; β= Koefisien regresi ; e= error

Sebelum melakukan analisis hubungan antara *fiscal stress* dengan Pendapatan Asli Daerah terlebih dahulu dilakukan analisis untuk menemukan kondisi *Fiscal stress*, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai *Fiscal Stress* dapat diukur dengan membandingkan Realisasi PAD dengan potensi/target penerimaan sumber-sumber Penerimaan PAD. Upaya yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat *fiscal stress* yang lebih besar, hal ini berarti permintaan untuk jasa tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang ada (Sukanto, 1999). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah diukur berdasarkan pendapatan asli daerah periode APBD dibagi dengan pendapatan asli daerah periode APBD sebelumnya (Haryadi, 2002). Pertumbuhan Belanja Langsung diukur berdasarkan Belanja Langsung periode APBD dikurangi dengan Belanja Langsung periode APBD sebelumnya.

Definisi Operasional

Fiscal stress merupakan tekanan *fiscal* suatu daerah dalam upaya untuk kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatkan penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jumlahnya meningkat. **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah** Adalah realisasi Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dibagi realisasi periode sebelumnya. **Pertumbuhan Belanja Langsung** merupakan Pengeluaran yang dilakukan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan program dan kegiatan daerah melalui belanja modal, belanja banrang dan jasa dan belanja pegawai langsung.

Hasil Analisis dan Bahasan Hasil Analisis

Analisis yang dilakukan tahap pertama adalah menggambarkan kondisi *fiscal stress*, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dan pertumbuhan Belanja Langsung.

Tabel 1. *Fiscal Stress*, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Langsung

Kota/Kabupaten	Tahun	<i>Fiscal stress</i>	Pert. PAD	Pert. Belanja Langsung
Manggarai	2014	100,30	125,21	124, 23
	2015	101,58	111,11	54,87
	2016	90,93	141,35	113,61
	2017	91,34	108,27	102,96
	2018	94,94	127,60	139,47
Timur Tengah Selatan	2014	75,09	120,75	121, 35
	2015	97,20	100,34	100,05
	2016	72,52	117,94	56,37

	2017	92,28	140,74	145,48
	2018	91,76	118,85	125,82
	2014	97,53	100,37	118,13
	2015	88,50	95,75	110,96
Ngada	2016	71,34	104,03	81,57
	2017	68,58	112,78	119,44
	2018	100,00	139,75	71,60
	2014	114,86	123,56	115,21
	2015	106,09	113,01	116,43
Kota Kupang	2016	88,50	101,72	140,69
	2017	92,63	129,52	71,58
	2018	107,64	138,49	71,90
	2014	90,96	187,45	98,87
	2015	115,55	271,38	409,52
Sumba Tengah	2016	114,43	150,06	129,49
	2017	101,63	147,51	122,48
	2018	85,69	93,77	65,36
	2014	129,56	98,75	101,65
	2015	100	124,86	85,76
Mangarai Barat	2016	74,63	92,80	75,75
	2017	93,37	125,95	130,38
	2018	94,84	117,21	94,62

(Sumber Data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI; data diolah)

Dari data tabel dapat dilihat tingkat *Fiscal stress* yang terjadi di Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Timur dari T.A 2014-2018. Upaya pajak yang tinggi mencerminkan tingkat *fiscal stress* yang tinggi pula. Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan Kota Kupang dan Sumba Tengah di posisi teratas dengan tingkat *fiscal stress* mencapai di atas 100%, sedangkan Kabupaten Manggarai, Timur Tengah Selatan, Ngada dan Kabupaten Manggarai Barat tingkat *fiscal stress* berada dibawah 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur mengalami tekanan fiskal yang sangat tinggi. *Fiscal stress* yang tinggi dan fluktuatif tidak diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan PAD dan Belanja Langsung. Analisis ini kemudian selanjutnya akan dibuktikan dengan analisis statistik sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan *mean fiscal stress*, PAD dan Belanja Langsung cukup tinggi untuk Pemerintah Provinsi NTT. Standar Deviasi tertinggi berada pada Belanja Langsung dan terendah pada *fiscal stress*. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2 .

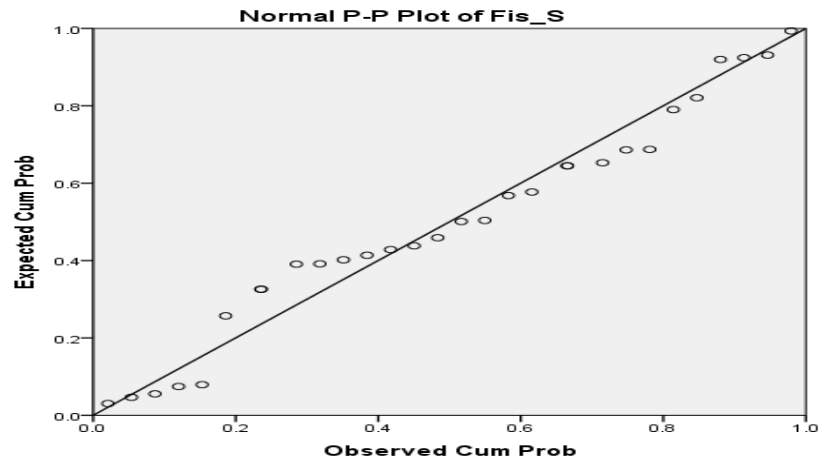
Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fis_S	30	68.58	129.56	94.8090	13.97665
PAD	30	92.80	271.38	126.0293	34.27094
BL	30	54.87	409.52	113.8533	61.46607
Valid N (listwise)	30				

Normalitas Data

Hasil uji normalitas data menunjukkan data terdistribusi normal, karena titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonalnya. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Gambar 1. Normalitas Data



Uji Hipotesis

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian regresi untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil pengujian dua (2) hipotesis sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana (Uji Hipotesis 1)

Model		Coefficients ^a				95.0% Confidence Interval for B		
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	47.758	41.801		1.143	.263	-37.866	133.383
	Fis_S	.826	.436	.337	1.892	.069	-.068	1.719

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil uji antara *fiscal stress* dan Pendapatan Asli Daerah dan dapat dijelaskan bahwa nilai T-hitung sebesar 1,143 < T-tabel sebesar 1,169 dengan tingkat signifikansi 0,069 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis ini tidak mendukung hipotesis 1. Secara

empiris menunjukkan bahwa *fiscal stress* tidak berdampak terhadap pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi-potensi penerimaan daerahnya untuk meningkatkan kemampuan kemandirian daerahnya. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *fiscal stress* adalah kondisi pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan belanjanya untuk menyediakan pelayanan publik tersebut (Wolohojian, 1981; Shamsud dan Akoto, 2004; Hendrick, 2011; Saonard, 2012). Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan *Fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Nampak dalam tabel hasil uji regresi linear sederhana berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana (Uji Hipotesis 2)

Model	Coefficients ^a				95.0% Confidence Interval for B	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
1 (Constan)	-					
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
	15.324	75.702		-.202	.841	-170.392 139.744
	Fis_S	.790	.310	1.724	.096	-.256 2.981

a. Dependent Variable: BL

Berdasarkan hasil uji antara *fiscal stress* dan Belanja Daerah dapat dijelaskan bahwa nilai T-hitung sebesar 1,724 > T-tabel sebesar 1,169 dengan tingkat signifikansi 0,096 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan belanja langsung. Hasil analisis ini tidak mendukung hipotesis 2. Secara empiris menunjukkan bahwa *fiscal stress* tidak berdampak terhadap pemerintah daerah dalam kebijakan daerah yang tercermin dalam struktur belanja daerah. Belanja daerah untuk pembiayaan program dan kegiatan tidak mempertimbangkan tingkat kemandirian daerah dalam hal keuangan. Hasil penelitian berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Haryadi, 2002; Andayani, 2004; Dongori, 2006; dan Purnaninthesa, 2006).

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Variabel *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai T-hitung sebesar 1,143 < T-tabel sebesar 1,169 dengan tingkat signifikansi 0,069 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya (Wolohojian, 1981; Shamsud dan Akoto, 2004; Hendrick, 2011; Saonard, 2012). Selanjutnya *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap belanja langsung dengan nilai T-hitung sebesar 1,724 > T-tabel sebesar 1,169 dengan tingkat signifikansi 0,096 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya (Haryadi, 2002; Andayani, 2004; Dongori, 2006; dan Purnaninthesa, 2006).

Penelitian ini berkontribusi terhadap kebijakan keuangan daerah melalui struktur anggaran dan pendapatan belanja daerah. Pemerintah daerah harus mempertimbangan dampak *fiscal stress* terhadap pendapatan daerah, sehingga mampu meningkatkan kemandirian daerahnya. Kemandirian daerah akan meningkatkan fleksibilitas pemerintah daerah menentukan kebijakan daerah dalam hal transfer kesejahteraan kepada masyarakat. Belanja daerah melalui belanja langsung tidak dipengaruhi oleh *fiscal stress* berimplikasi terhadap pemerintah daerah dalam hal pertimbangan anggaran belanja dengan mempertimbangkan kemandirian daerah.

Keterbatasan penelitian ini adalah pada ukuran sampel yang kecil, yaitu 6 kabupaten/kota dari total populasi 21 kabupaten kota dengan rentang data 5 tahun dan pada penggunaan alat analisis regresi linear sederhana, sehingga hubungan antar variabel diuji secara masing-masing. Penelitian selanjutnya

diharapkan untuk menempatkan *fiscal stress* sebagai variabel konsekuen seperti dalam penelitian Muda (2012). Penelitian selanjutnya juga mempertimbangkan alat analisis lain seperti korelasi kanonikal karena menggunakan dua variabel dependen dengan skala metrik dan penggunaan variabel-variabel lain seperti dalam penelitian Nollenberger, Grover, dan Valente (2003), Henadle, Costa dan Angels (2004), Hendrick (2011), Jacob dan Hendrick (2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. (2005). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- _____. (2006). *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Andayani W. (2004). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor publik vol 05, No 1 Februari.
- Bahl, R. (1984) *Financing State and Local Government in the 1980s*. New York: Oxford University Press.
- Dongori, Dessy Patricia F. (2006). *Pengaruh Tekanan Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Andrew Young School of Policy Studies. Working Paper Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Groves, S. M., and M. G. Valente. (1986). *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government*. Washington, DC: International City/County Management Association.
- Halim, Abdul. (2004). *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Kompak. STIE Yogyakarta.
- Haryadi, Bambang. (2002). *Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi V. Semarang.
- Hendrick, R. (2004). "Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Governments: Focus on Chicago Metropolitan Suburbs." *Urban Affairs Review* 40 (1): 78–114.
- _____. (2011). *Managing the Fiscal Metropolis: The Financial Policies, Practices, and Health of Suburban Municipalities*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Honadle, B., J. Costa, and B. Cigler. (2004). *Fiscal Health for Local Governments: An Introduction o Concepts, Practical Analysis, and Strategies*. San Diego, CA: Elsevier Academic Press.
- Holcombe, R. G. & Sobel, R.S. (1995) . "The Relative Variability of State Income and Sales Taxes over the Revenue Cycle," *Atlantic Economic Journal*, 23 (2), 97-113.
- Oates, W.E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah: Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Pendalam Ekonomi Rakyat.
- Muda, I. (2012). *Variabel yang mempengaruhi Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara*. Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 4, No.1
- Nollenberger, K., S. M. Groves, and M. G. Valente. 2003. *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government*, 4th ed. Washington, DC: International City/County Management Association.
- Nanga. (2005). *Disparitas Fiskal di Indonesia*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Purnaninthesa. Anggita. (2006). *Analisis Pengaruh Fiscal Stress terhadap Tingkat Pembiayaan Daerah, Mobilisasi Daerah, Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se*

Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya. Wacana. Salatiga.
Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
Shamsub, Hamnarong., Joseph B Akoto. (2004). State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol 16, No 1 Hal: 40-61.
Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah